

**ANALISIS LAPORAN KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2006-2007**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :
NANDA AYU PUSPITASARI
B 200 050 014**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah yang pada dasarnya menurut Mardiasmo (2002) mengandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, Pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang sangat penting dimiliki, seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik.

Berkaitan dengan keuangan daerah, masing-masing daerah dihadapkan pada permasalahan pengelolaan (manajemen) keuangan baik sisi penerimaan maupun belanja / pengeluaran daerah. Manajemen pengelolaan daerah merupakan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Untuk itu dalam merespon tuntutan yang semakin banyak beragam tersebut pemerintah daerah perlu memiliki sistem manajemen keuangan publik yang handal. Hal ini sangat penting karena masalah buruknya manajemen keuangan publik telah mengakibatkan anggaran publik yang tidak efektif dan efisien (seperti bocornya anggaran) dan kinerja sektor publik yang mengecewakan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan hanya bisa tercapai dengan pemanfaatan dana oleh pemerintah daerah yang benar-benar terarah untuk pelayanan publik yang optimal melalui proses penganggaran secara baik.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat, dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Dalam siklus anggaran, yaitu pada persiapan dan penyusunan anggaran, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Dimana penentuan taksiran ini dilakukan dengan proses estimasi. Dalam persoalan estimasi, terdapat faktor *uncertainty* yang cukup tinggi. (Mardiasmo, 2002).

Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus

dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Penilaian kinerja terhadap lembaga / orang tidak hanya berlaku pada lembaga / orang yang berorientasi profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga / orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana Pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah. Menurut Mohamad Mahsun (2006 : 31), pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain :

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berujud (*tangible*) maupun tidak berujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Perbaikan di segala bidang juga dilakukan untuk mengembangkan daerah. Usaha-usaha dalam mengembangkan daerah dilakukan pemerintah melalui berbagai program. Dalam upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan program serta pengalokasian sumber-sumber pada aktivitas yang menambah nilai bagi publik. Dengan sistem akuntansi yang baik, kualitas suatu anggaran daerah akan dapat tercapai. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS LAPORAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006-2007”**

B. Perumusan Masalah

Pentingnya pengukuran laporan kinerja dalam suatu Pemerintah Daerah untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan dan digunakan untuk kelangsungan pembangunan yang dipergunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut: “Bagaimana menganalisis laporan kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Surakarta pada tahun anggaran 2006-2007?”

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada laporan kinerja keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006-2007 berdasarkan Laporan Realisasi APBD di Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2006-2007.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menganalisis laporan

kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2006-2007.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik (ASP). Selanjutnya dapat sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

Sementara bagi Pemerintah Kota Surakarta diharapkan menjadi alternatif masukan untuk mengukur laporan kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Surakarta.

Dan bagi penulis sendiri, dimana diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pengembangan wawasan tentang Akuntansi Sektor Publik.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengukuran kinerja anggaran keuangan daerah, analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Kota Surakarta, hasil analisis serta pembahasannya terhadap pengukuran laporan kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Surakarta.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis yang telah dilakukan serta saran yang berisi usulan yang dianjurkan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.